

## **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar**

**Rahmawati<sup>1\*</sup>, Erly Mulyani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [rahmajen24@gmail.com](mailto:rahmajen24@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

21 Mei 2025

**Tanggal Revisi:**

17 Juli 2025

**Tanggal Diterima:**

22 Juli 2025

---

**Keywords:** *Village Fund Management; Accountability; Comptency of Apparatus; Utilization of Information Technology; Community Participation.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Rahmawati & Mulyani, E. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (3), 915-928.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2908>

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

**Abstract**

*The research aims to determine the influence of competency of apparatus, utilization of information technology and community participation on village fund management accountability (Empirical Study on Nagari in Tanah Datar Regency). The population used in this research was all nagari apparatus in Tanah Datar Regency, totalling 600 nagari apparatus from 75 nagari. The sampling technique uses a purposive sampling method. In determining the number of samples, Issac and Michael's formula was use to obtain 234 apparatus on 30 nagari. This type of research is quantitative research. The data source in this research is primary data by distributing questionnaires to nagari official in Tanah Datar Regency. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The result of this research show that competency of apparatus, utilization of information technology and community participation have a positive and significant effect on village fund management accountability.*

## **PENDAHULUAN**

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera melalui pendanaan asministrasi pemerintahan, pelaksanaan proyek Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan diri, dengan tetap menjaga khasnya (Siafu et al., 2020). Menurut peraturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin

transparan dan akuntabel. Peningkatan akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki praktik pengelolaan sumber daya publik, meningkatkan kualitas layanan sosial, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara penyedia layanan dan masyarakat (Makanga et al., 2023).

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan kompeten sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai (Makalalag et al., 2017). Kompetensi aparatur desa merujuk pada karakteristik yang mencakup perilaku, sifat, pengetahuan, dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan baik. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintahan, khususnya perangkat desa (Goo & sanda, 2022).

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya optimal dalam menggunakan komputer, perangkat lunak, basis data, jaringan, *electronic commerce*, serta berbagai jenis teknologi terkait lainnya (Alminanda & Marfuah, 2018). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

Selain kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas karena dengan keterlibatan masyarakat maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat (Mada et al., 2017). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan atau keikutsertaan mereka secara sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil dari kegiatan tersebut (Ariningsih, 2021).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 1.336 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan dan 75 nagari. Dalam mewujudkan otonomi nagari yang akuntabel di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Tanah Datar telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan nagari yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran alokasi dana nagari dan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari.

Terkait permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021, Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa serapan dana nagari masih tergolong rendah hanya mencapai 28 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Rendahnya tingkat serapan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana nagari untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu diatasi agar tujuan dari alokasi dana nagari dapat tercapai secara optimal. Selain itu kepala dinas PMDPPKB mengungkapkan bahwa adanya keterlambatan pencairan dana nagari yang berkontribusi terhadap rendahnya serapan dana nagari tersebut (sumbar.antaranews.com).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* dan *agency* sebagai landasan berfikir. Teori *stewardship* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson & Davis, 1991). Berdasarkan teori *agency*, pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* dalam mengelola dana desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 kepada masyarakat sebagai pihak *principals*. Implikasi teori ini

adalah menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal (Budiana et al., 2019).

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa karena terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar mengenai rendahnya tingkat serapan dan keterlambatan pencairan dana nagari. Penelitian yang mengeksplorasi hubungan interaktif antar ketiga variabel masih belum banyak dilakukan, sehingga kontribusi relatif masing-masing faktor belum tergambarkan secara utuh. Kemudian, adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* mengasumsikan filosofi sifat manusia pada hakikatnya yaitu jujur, tanggungjawab, serta integritas. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1991). Teori *stewardship* menekankan bahwa manajemen dapat bertindak tepat untuk keuntungan banyak orang, menghasilkan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi (Budiana et al., 2019).

Penerapan teori *stewardship* pada penelitian ini karena kepercayaan dari *principals* yang diberikan kepada pemerintah desa (*stewards*) dapat terjadi jika *stewards* bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori *stewardship* pada organisasi pemerintahan desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, dan memberikan pelayanan yang baik serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat tercapai (Budiana et al., 2019).

### *Agency Theory*

Teori keagenan merupakan teori yang dapat menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principals*) dan manajer (*agent*). Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen & Smith, 1984). Permasalahan keagenan muncul ketika tujuan *principals* dan *agent* bertentangan (*conflict of interest*), sedangkan pembagian risiko akan muncul ketika sikap *principal* terhadap risiko berbeda dengan sikap *agent* sehingga memunculkan kedua tindakan yang berbeda (Sudarmanto, 2021).

Pada hakikatnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Implikasi teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat ketika pemerintah desa yang bertindak sebagai *agent* dalam mengelola dana desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018 kepada masyarakat sebagai *principals* (Ismail et al., 2016).

## **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk membagikan penanggungjawaban atau menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun yang berwenang memohon pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan perihal yang berarti untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, daya guna, reliabilitas serta prediktibilitas (Subroto, 2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa diharapkan memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa. Dana desa merupakan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh (Santoso et al., 2020) ada lima indikator yaitu kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan.

## **Kompetensi Aparatur Desa**

Menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, aparatur desa harus memiliki kompeten dengan latar belakang pendidikan akuntansi, konsisten mengikuti pelatihan, serta memiliki pengetahuan tentang keuangan (Budiana et al, 2019). Kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh (Savitri et al., 2022) ada tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap.

## **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang meliputi *hardware*, *software*, dan program pengoperasian untuk memperoleh, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Warsita, 2011). Penggunaan teknologi informasi merujuk pada pemanfaatan teknologi komputer untuk tujuan mengubah data menjadi informasi dan menyebarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat tertentu (Savitri et al., 2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) ada lima indikator yaitu proses kerja secara elektronik, pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, pengolahan informasi dengan jaringan internet, sistem manajemen, perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer.

## **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi, dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi (Solekhan, 2014). Sedangkan

partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi, pelaksanaan upaya mengatasi, dan keterlibatan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance*, dimana masyarakat mempunyai hak dan peran secara aktif dalam upaya pengambilan keputusan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan (Sujarweni & Wiratna, 2015). Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh (Waladiyah, 2018) ada enam indikator yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, memberikan penghargaan.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa**

Kompetensi aparatur desa memiliki peran penting dalam kemajuan organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Mada et al., 2017). Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan kompetensi aparatur desa, aparatur desa (*steward*) yang bertindak dalam suatu organisasi sektor publik berfokus pada kemampuan memberikan layanan yang baik dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*principals*) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga dalam memutuskan bagaimana penggunaan keuangan desa, akan menghasilkan keputusan yang terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tugas yang diharapkan (Budiana et al., 2019). Oleh karena itu kompetensi aparatur sangat penting agar tata kelola dana desa berjalan dengan baik (Widyatama et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diansari et al., 2023) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa**

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut secara tepat dan cepat seperti pada penggunaan aplikasi siskeudes. Implikasi teori *stewardship* jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat selaku *principals*. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, aparatur desa dapat lebih siap menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawabn kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Savitri et al., 2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan yang disebut dengan

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa (Hasniati et al., 2017). Implikasi teori keagenan jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat yaitu dimana partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu aktor yang mengawasi sebagai pihak *principal* terhadap kinerja aparatur desa sebagai *agent*. Salah satu komponen penting untuk terciptanya keberhasilan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat (Ananda et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fajri & Julita, 2021) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Bougie et al., 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari di Kabupaten Tanah Datar pada 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 600 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probabilitas sampel yang menerapkan purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu perangkat nagari yang terlibat langsung dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu Kepala Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan. Pada penelitian ini jumlah sampel dalam pengumpulan data primer yaitu 234 responden pada 33 nagari di Kabupaten Tanah Datar yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

## **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

### **Variabel Dependen**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma, 2018). Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur dengan lima indikator (Santoso et al., 2020) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Wardana, 2021) menggunakan skala likert 1-5.

## **Variabel Independen**

### **Kompetensi Aparatur Desa**

Kompetensi aparatur desa merupakan karakteristik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sifat aparat desa dalam pengelolaan dana untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Zulkifli et al., 2021). Variabel kompetensi aparatur desa diukur dengan tiga indikator (Savitri et al., 2022) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Mada et al, 2017) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti menggunakan skala likert 1-5.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya optimal dalam menggunakan komputer, perangkat lunak, basis data, jaringan, electronic commerce, serta berbagai jenis teknologi terkait lainnya (Alminanda & Marfuah, 2018). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan lima indikator dan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Wardani & Andriyani, 2017) menggunakan skala likert 1-5.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan atau keikutsertaan mereka secara sukarela dan aktif dikarenakan alasan tertentu dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil dari kegiatan tersebut (Ariningsih, 2021). Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan enam indikator dan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Waladiyah, 2018) menggunakan skala likert 1-5.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Berdasarkan data penyebaran kuesioner kepada responden didapatkan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|                   | <b>N</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Mean</b> | <b>Std. Deviation</b> |
|-------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Total_X1          | 228      | 13             | 35             | 31.53       | 3.009                 |
| Total_X2          | 228      | 16             | 35             | 30.71       | 3.395                 |
| Total_X3          | 228      | 18             | 40             | 31.14       | 4.920                 |
| Total_Y           | 228      | 24             | 40             | 37.40       | 3.260                 |
| Valid N(listwise) | 228      |                |                |             |                       |

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini terdapat 4 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 228 responden. Pada variabel kompetensi aparatur desa (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 31,53 dengan standar deviasi 3,009 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 13. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,71 dengan standar deviasi 3,395 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 16. Variabel partisipasi masyarakat (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 31,14 dengan standar deviasi 4,920 dengan nilai tertinggi 40 dan nilai terendah 18. Untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 37,40 dengan standar deviasi 3,260 dengan nilai tertinggi 40 dan nilai terendah 24.

## Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**

|                                    |           | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| N                                  |           | 228                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean      | .0000000                |
|                                    | Std.      | 3.33562514              |
|                                    | Deviation |                         |
| Most Extreme Differences           | Absolute  | .054                    |
|                                    | Positive  | .054                    |
|                                    | Negative  | -.037                   |
| Test Statistic                     |           | .054                    |
| Asymp.Sig. (2-tailed) <sup>c</sup> |           | .200 <sup>d</sup>       |

Berdasarkan tabel 2, terlihat nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari hasil di atas yaitu seluruh data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       | Tolerance               | VIF   |
| (Constant) | 5.808                       | 1.106      |                           | 2.329  | <.001 |                         |       |
| 1 X1       | -.080                       | .028       | -.151                     | -2.880 | .004  | .984                    | 1.016 |
| X2         | .209                        | .023       | .478                      | 8.940  | <.001 | .945                    | 1.058 |
| X3         | .108                        | .018       | .319                      | 6.012  | <.001 | .959                    | 1.042 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* setiap variabel  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.   |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|--------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |        |
| (Constant) | 8.393                       | 0.990      |                           | 8.474  | <0.001 |
| 1 Total_X1 | -0.041                      | 0.042      | -0.082                    | -0.982 | 0.327  |
| Total_X2   | -0.148                      | 0.037      | -0.133                    | -1.989 | 0.226  |
| Total_X3   | -0.025                      | 0.021      | -0.083                    | -1.199 | 0.232  |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel bebas  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.   |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |        |
| (Constant) | 5.808                       | 1.106      |                           | 2.329 | <0.001 |
| 1 X1       | 0.080                       | 0.028      | 0.151                     | 2.880 | 0.004  |
| X2         | 0.209                       | 0.023      | 0.478                     | 8.940 | <0.001 |
| X3         | 0.108                       | 0.018      | 0.319                     | 6.012 | <0.001 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai konstanta ( $\beta_0$ ) = 5,808 dan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) = 0,080 ( $\beta_2$ ) = 0,209 ( $\beta_3$ ) = 0,108 dan  $e = 1,106$ . Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,808 + 0,080X_1 + 0,209X_2 + 0,108X_3 + 1,106$$

### Uji Hipotesis

#### Uji t (Parsial)

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa:

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) sebesar  $t_{hitung} 2,880 > t_{tabel} 1,971$ , serta nilai signifikansi  $X_1$  sebesar  $0,004 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 1 diterima**).
- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) sebesar  $t_{hitung} 8,940 > t_{tabel} 1,971$ , serta nilai signifikansi  $X_2$  sebesar  $0,001 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 2 diterima**).
- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) sebesar  $t_{hitung} 6,012 > t_{tabel} 1,971$ , serta nilai signifikansi  $X_1$  sebesar  $0,001 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (**Hipotesis 3 diterima**).

#### Uji F (Simultan)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

| Model        | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.                |
|--------------|----------------|-----|-------------|--------|---------------------|
| 1 Regression | 189.592        | 3   | 63.197      | 48.702 | <0.001 <sup>b</sup> |
| Residual     | 290.667        | 224 | 1.298       |        |                     |
| Total        | 480.259        | 227 |             |        |                     |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant),  $X_3$ ,  $X_1$ ,  $X_2$

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi (sig) yang muncul adalah 0,001 yang berarti  $F_{sig}$  ( $0,001 < 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan

kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R2)**

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0.701 <sup>a</sup> | 0.491    | 0.484             | 2.341                      |

a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2  
b. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,484. Hasil ini berarti besar pengaruh variabel independen (kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) sebesar 48% sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti hipotesis dalam penelitian diterima. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa, maka semakin tinggi tingkat pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar hasil rekapitulasi jawaban responden paling tinggi 93,25% yaitu dalam melakukan pekerjaan, semua aparatur desa selalu mengedepankan etika dan kode etik. Penerapan etika dan kode etik menjadi pedoman bagi aparatur desa untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, aparatur desa dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran, sekaligus memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan peraturan serta kebutuhan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Penelitian ini mendukung *stewardship theory* yang menjelaskan bahwa aparatur desa yang bertindak sebagai *stewards* dalam suatu organisasi sektor publik berfokus pada kemampuan memberikan layanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak *principals*. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan. Kompetensi yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa seiring dengan meningkatnya kompetensi aparatur desa tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diansari et al., 2023), (Santoso et al., 2022) dan (Savitri et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Widyatama et al., 2017) yang menyatakan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Pemanfaatan teknologi ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar hasil rekapitulasi jawaban responden paling tinggi 93,77% yaitu unit kerja anda telah dilengkapi dengan jaringan internet. Dilihat dari kondisi ril di lapangan dalam pemanfaatan teknologi informasi sudah baik, setiap kantor wali nagari memiliki akses jaringan Wi-Fi, dan komputer yang lengkap dalam membantu melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, pemberian informasi pengelolaan dana desa. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) pada komputer maka hal tersebut dapat mempermudah aparatur desa dalam menyusun dana desa sehingga mempercepat pekerjaan dan memperkecil kemungkinan untuk data tersebut dimanipulasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat.

Penelitian ini mendukung *stewardship theory* yang menjelaskan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Pratolo & Fadilah 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Dewi et al, 2021), (Savitri et al., 2022) dan (Audia & Mulyani, 2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Adhivinna & Damayanti, 2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat karena prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat sehingga penggunaan dan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden paling banyak 87,54% yaitu masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan fakta pada beberapa nagari yang telah melakukan kegiatan Musyawarah Rerencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat dusun hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa serta perwakilan dari masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan tingginya partisipasi masyarakat maka merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas karena dengan

keterlibatan masyarakat maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat (Mada et al., 2017).

Penelitian ini mendukung teori keagenan (*Agency Theory*) dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor dalam memonitoring penyusunan anggaran serta pengawasan program- program yang berkaitan dengan pendanaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri & Julita, 2021) dan (Mada et al., 2017), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Wibisono et al., 2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengesahkan Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada nagari di Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa: (1) Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada aparatur desa yang ada di Kabupaten Tanah Datar saja, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data hanya melalui kuesioner sehingga masih ada kemungkinan beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban responden yang tidak cermat serta pernyataan kurang dipahami oleh responden, sehingga belum memberikan gambaran yang jelas maupun mampu menggeneralisasikan keadaan pada daerah lain. Mengingat waktu dan luasnya daerah penelitian ini hanya mengambil 30 nagari dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah desa sebaiknya meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur desa dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian serta dapat menambah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti budaya organisasi, penerapan sanksi administratif, dan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>

- Ananda, N, Z., Melati, O., Lenni, Y. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jekobs*, 2(1), 23–37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOB>
- Ariningsih, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sangia Makmur, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana). *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 19.
- Bougie, R. & Sekaran, U. (2010). *Research Methods For Business*, Fifth Edition. John Wiley and Sons Ltd.
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). The Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-66. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), <https://doi.org/10.2221/accounting.v1i1.30>
- Hasniati, R. & Yunus. 2017. “Memperkuat Modal Sosial untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Sektor Publik”. *Asian Journal of Applied Sciences* Volume 05 378, April <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/435414/serapan-dana-desa-di-tanah-datar-rendah>
- Isbandi, Rukminto. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Jensen (Deceased), Michael C. & Smith, Clifford W. (1984) *The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview*. Michael C. Jensen, Clifford W. Smith, Jr., *THE MODERN THEORY OF CORPORATE FINANCE*, New York: McGraw-Hill Inc., pp. 2-20, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.244161>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2)
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Makanga, C. N., Orobia, L. A., Kaawaase, T. K., Nabeta, I. K., Katoroogo, R. M., & Munene, J. (2024). Enhancing public accountability in a city authority. *Journal of Work-Applied Management*, <https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2023-0111>
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Santoso, L., Suprihati, S., & Ningsih, S. (2022). The Effect Of Village Apparatus Competence, Internal Control System, And Organizational Commitments On Village Fund Management Accountability (Case Research in Banyudono District).

- International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(3), 1233–1243. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6236>
- Savitri, E., Andreas, Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability Of Village Fund Managemen in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontenporer*, 14(2088–5091), 131–138.
- Siafu, O., Rawung, S. S., & Kawulur, A. F. (2020). Analysis of Village Fund Budget Management in Bololo Village, North Wasile District, East Halmahera Regency. *International Journal of Applied Business and International Management*, pp. 53-64, <https://doi.org/10.32535/ijabim.v0i0.876>
- Solekhan, Moch. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press.
- Subroto. (2019). *Akuntabilitas Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat
- Sudarmanto, Eko. 2021. *Good Corporate Governance*.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V & Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Supadmi & Dharma. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Waladiyah, U. (2018). Pengaruh atas Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 7(2), 44–68
- Wardana, I. M. Y. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kerambitan. Universitas Pendidikan Ganesha
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Warsita, B. (2014). Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, XV, 84–96. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.91>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-21.
- Zulkifli, S, & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi*, 6(1), 26-38, <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>